

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DALAM PEMBINAAN KOPERASI
(Studi dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Kota
Lhokseumawe)**

Lisa Iryani

Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Email: *lisa.iryani @unimal.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini di dasarkan masih banyaknya koperasi tidak aktif daripada koperasi aktif yang tersebar di 4 kecamatan dalam Kota Lhokseumawe dengan jumlah koperasi hingga pada tahun 2018 sebanyak 300 unit koperasi dengan kategori Koperasi Aktif sebanyak 127 unit koperasi dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 125 unit koperasi termasuk 48 unit koperasi yang telah dibubarkan. Namun, pemerintah telah merancang berbagai program untuk membina koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif sehingga dengan kasus tersebut pembinaan yang selama ini berjalan belum dilaksanakan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi dan kendala pembinaan koperasi di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa startegi Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan memberikan arahan atau konsultasi dengan melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi, Pembinaan, Pelatihan Manajemen Koperasi dan kunjungan ke lapangan secara langsung. Namun kendala yang dihadapi dalam pembinaan koperasi yakni keterbatasan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia maupun anggarannya. Rekomendasi penelitian, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menguatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe hingga Pemerintah tingkat Gampong dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan sumber daya manusia maupun anggaran serta merevitalisasi Dekopinda dalam menguatkan langkah-langkah strategis dalam pengembangan koperasi sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Koperasi, Strategi, Pembinaa

A. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai lembaga harus dilihat sebagai sistem sosial ekonomi dalam setiap upaya pemberdayaan agar koperasi tetap eksis, sehingga dalam penerapannya koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tingkat koperasi yang efektif dalam operasionalnya. Oleh karena itu sangat ditentukan oleh adanya organisasi dan manajemen yang baik, handal dan profesional. Keberadaan koperasi sebagai lembaga yang berjalan efektif dan mandiri sangat ditentukan oleh usaha koperasi akan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya yang didukung oleh kekuatan fundamental internal organisasi koperasi yang solid dalam mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri sehingga dapat mewujudkan kemandirian koperasi dan menciptakan manajemen serta organisasi koperasi yang baik.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/per/M.KUKM/III/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Neagara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 18/per/M.KUMK/VII/2006 Tentang Pedoman Teknik Bantuan Pekutaan Dalam Bidang Produksi Keapada Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 22/PER/M.KUKM/IV/2007 Tentang Pedoman Peringkatan Koperasi Menjelaskan bahwa koperasi usaha mikro,uasha kecil, dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kota Lhokseumawe, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp. 3 Miliar untuk koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebahagiannya mendapatkan Rp.50 juta, jika anggota koperasinya di bawah 50 orang. Sedangkan jika anggotanya di atas 50 orang, maka diberikan bantuan sebesar Rp. 150 juta. Selain itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias telah memberikan bantuan miliar rupiah pada sepuluh di koperasi Kota Lhokseumawe. Namun sebanyak 135 koperasi di Kota Lhokseumawe saat ini sudah tidak aktif. Koperasi yang tidak aktif akan di *black list*. Koperasi-koperasi tersebut tergolong dalam koperasi bermasalah dan tidak akan pernah mendapatkan dukungan modal usaha dari pemerintah kota tersebut. (Wawancara, 23 February 2019).

Banyaknya koperasi yang ada di setiap daerah, sangat memerlukan pembinaan baik bagi membangun dan melancarkan sebagai sebuah koperasi bagi masyarakat, sebuah koperasi juga harus memiliki aturan dan sistem hingga membuat koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal hingga tidak terdapat penipuan atau penyalahgunaan koperasi yang tidak sesuai aturan. Fenomena yang ada Banyaknya Koperasi yang sesuai dengan kriteria koperasi yang sesuai dengan aturan, kurangnya partisipasi Aktif Pengurus maupun anggota Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Lemahnya Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Lemah komunikasi antara Kecamatan maupun desa dengan dinas terkait serta lemahnya Sumber Daya yang dimiliki baik pemerintah maupun koperasi Dengan itu sangat diperlukan pembinaan bagi koperasi yang ada baik di setiap daerah maupun secara nasional hingga dapat terbentuk koperasi sesuai dengan tujuan awal terarah dan kepentingan masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Aktif (unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total
1	2014	170	102	272
2	2015	180	102	282
3	2016	191	100	291
4	2017	119	175	294
5	2018	127	125	300

Sumber : Disperindagkop, tahun 2018.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi (disperindagkop) Kota Lhokseumawe, jumlah jumlah koperasi pada tahun 2010 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 170 unit koperasi dan 102 dikategorikan tidak aktif dan total 272 unit koperasi, sedangkan pada tahun 2011 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 180 dan 102 dikategorikan tidak aktif dari total 282 unit koperasi, pada tahun 2013 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 191 unit koperasi dan 100 dikategorikan tidak aktif dari total 291 unit koperasi, pada tahun 2014 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 119 unit kopراسي dan 175 dikategorikan tidak aktif dari total 294 unit koperasi, sedangkan apada tahun 2015 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 127 dan koperasi tidak aktif sebanyak 125 unit koperasi dan koperasi sebanyak 300 unit koperasi. (sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018).

Koperasi Di Kota Lhokseumawe yang tersebar empat (4) kecamatan masih belum berkembang dengan baik, selama ini keberadaan koperasi kurang perhatian bagi stakeholder yang ada di Kota Lhokseumawe. Setiap tahunnya jumlah koperasi yang tidak aktif atau membubarkan diri seara tidak terdata semakin bertambah. Sehingga peranannya di tengah-tengah masyarakat masih rendah, keberadaan

koperasi belum mampu memberikan dampak pemberdayaan secara langsung bagi masyarakat, baik sebagai anggota atau masyarakat yang tidak terlibat sebagai anggota koperasi.

Hal ini sangat tidak sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe tahun 2017 yang bahwa dalam rangka meningkatkan SDM pengurus koperasi, Disperindagkop perlu mengadakan upaya pembinaan secara terus menerus kepada koperasi untuk dapat dibuka unit usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang. Pada kenyataannya, hingga akhir tahun 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe masih belum maksimal dalam melakukan upaya pembinaan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe dengan penelitian akan dilihat tentang strategi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Lhokseumawe dalam Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan bahwa di kota Lhokseumawe ditemukan banyaknya koperasi yang sudah lama dibentuk, namun dari keseluruhan jumlah koperasi yang ada, kurang dari setengah jumlah tersebut yang tercatat aktif. Hal ini terjadi akibat kurangnya upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang memudahkan peneliti untuk melihat persoalan secara nyata dan sesuai dengan realita yang berkembang di lapangan. Dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada, karena berbentuk pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tidak dalam bentuk angka dan tabel. Penelitian ini juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlangsung dan berpengaruh dari fenomena. Penyajian data kualitatif terutama dari hasil wawancara bersifat informasi dan menerangkan dalam bentuk uraian. Data juga tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, namun berbentuk kalimat dan penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, tingkah laku dan peristiwa tertentu". (Moloeng, 2005:42).

Informan Penelitian.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini “ *teknik purposive* ” dalam hal ini memilih berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Moloeng (2005:132), informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian”.

Adapun informan yang di wawancarai sesuai dengan judul informasi yang diperlukan antara lain:

1. Zulfikri, SE.,MM selaku Kasubag Ekonomi dan Pembangunan Pada Kantor Walikota Lhokseumawe.

2. Armiami, S.Sos selaku Kabid Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kota Lhokseumawe
3. Dra. Anisawati selaku Kasi. Pembiayaan dan Simpan Pinjam Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kota Lhokseumawe
4. Nurmala Selaku Kabid Kesra Pada Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe
5. Ahmadi, selaku Keuchik Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
6. Ridwan selaku Keuchik Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Abdullah Selaku Kaur Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
8. Hamali, selaku Pengawas Koperasi Tugu Pahlawan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
9. Hj. Maria Ulfa Selaku Pengelola Dana BRR pada Koperasi Melati Sakti Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
10. Teuku Imran Usman, SE, Ak., CA selaku Ketua Pengurus Koperasi Afdhal Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
11. Mursyidah selaku Anggota Koperasi Melati Sakti Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
12. Sulaiman selaku masyarakat Gampong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Menurut Moloeng (2005:174), yang menyatakan bahwa “observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung, terlibat, kemudian mencatat perilaku sebagaimana yang telah terjadi pada keadaan yang sebenarnya mengamati sendiri ke tempat ketempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”. Maka dalam penelitian ini peneliti mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik “wawancara tidak terstruktur adalah wawancara lebih bebas yang diajukan oleh peneliti kepada pihak informan bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, mendalami situasi sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder pelengkap data primer, yaitu pengumpulan data melalui dokumen resmi seperti peraturan

perundang-undangan, buku-buku, arsip, kutipan-kutipan yang di analisis, surat menyurat, laporan resmi, dan survei yang menggunakan pertanyaan terbuka.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data digunakan dalam peneliti ini adalah *analisis kualitatif* serta hasil wawancara ditampilkan untuk mendukung analisis. Analisa data digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian ini dengan menggunakan model analisis interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2005:5) ditempuh empat langkah yaitu:

1. Koleksi data

Koleksi data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang sangat penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses peneliti akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah menurut kepentingan pokok dan difokuskan untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan. Data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir

menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu dan direduksi.

4. Verifikasi (Pengarikan Kesimpulan)

pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, pengamatan yang tertulis dalam lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel Daftar Keterangan Koperasi
Berdasarkan Kecamatan
Kota Lhokseumawe**

No	Kecamatan	Tahun									
		2016			2017			2018			
		A	TA	T	A	TA	T	A	TA	BB	T
1	Muara Satu	28	15	43	16	29	45	18	18	9	45
2	Muara Dua	36	24	60	20	40	60	21	30	10	61
3	Blang Mangat	102	54	156	64	93	157	69	71	22	162
4	Banda Sakti	25	7	32	19	13	32	19	6	7	32
	Jumlah	191	100	291	119	175	294	127	125	48	300

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, 2018

Keterangan;

A : Aktif

TA : Tidak Aktif
BB : Bubar
T : Total

Strategi Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe

Strategi merupakan rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan khususnya pembinaan koperasi di Kota Lhokseumawe dimana hal ini masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dari pada koperasi aktif yang tersebar empat kecamatan dalam Kota Lhokseumawe.

Pengaturan Strategi

Strategi akan terlaksana dengan baik jika terjadinya komunikasi yang efektif saat penyampaian informasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan masyarakat khususnya koperasi. Pemerintah kota Lhokseumawe dapat mensosialisasikan masyarakat dapat memahami dengan jelas tanpa adanya ambiguitas dalam memahami tujuan dari program tersebut dan menghindari terjadinya distorsi khususnya koperasi dalam hal pembinaan koperasi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pada tahun 2018 jumlah koperasi di Kota Lhokseumawe sebanyak 300 unit koperasi yang terdiri dari 125 unit koperasi dikategorikan tidak aktif dan yang kategori aktif sebanyak 127 unit koperasi serta koperasi bubar sebanyak 48 unit koperasi Kota Lhokseumawe yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 2 tahun berturut-turut dan tidak distornya simpanan wajib dan simpanan pokok kepada koperasi dimana 2 (dua) setoran ini menjadi modal koperasi dalam menjalankan usahanya, dalam hal ini yang termasuk dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Bab VII Pasal 41 Ayat (1) menjelaskan bahwa Modal Koperasi dapat bersal dari Modal Sendiri dan Modal pinjaman, kemudian diatur pada ayat (2) menyatakan

bahwa Modal Sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana Cadangan dan Hibah. Kemudian dalam Bab VI Pasal 26 Ayat (1) menyatakan Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun dan Ayat (2) menyatakan Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Berdasarkan salah satu rumusan yang komprehensif tentang strategi yaitu menentukan dan menyampaikan tujuan organisasi dalam pengertian sasaran jangka panjang dan program bertindak. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi telah membuat program-program yang tertuang dalam rencana strategis satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2017 salah satunya program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pembubaran Koperasi, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Pelatihan Akuntansi dan Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil mikro serta Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dengan adanya program yang telah tertuang dalam Renstra tersebut populasi koperasi aktif dan jumlah anggota semakin meningkat sehingga strategi pemerintah Kota Lhokseumawe diarahkan melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait.

Strategi merupakan penentuan tujuan dari jangka panjang dan sebagai sebuah rencana koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Namun, selama ini strategi pembinaan yang diberikan oleh dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe hanya memberikan arahan pada saat dilakukan rapat berupa himbauan-himbauan.

Namun, sebagaimana pihak koperasi baik koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif tidak diberikan dukungan baik arahan maupun program yang akan implementasikan sehingga pemerintah dan koperasi tidak bersinergi dalam mengembangkan kemandirian koperasi masing-masing berjalan dengan sendirinya khususnya pembinaan bagi koperasi itu sendiri hal ini sebagai mana permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Lhokseumawe yakni keterbatasan anggaran dan keterbatasan Sumber Daya yang ada pada Koperasi tersebut. Pengawasan yang tidak dilaksanakan secara ketat terhadap koperasi yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran juga menyebabkan strategi pembinaan ini belum berjalan dengan maksimal.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa masih sedikitnya partisipasi koperasi dalam ikut menjalankan kebijakan ini, masih banyaknya koperasi yang tidak aktif di Kota Lhokseumawe khususnya kecamatan Banda Sakti hal ini disebabkan masih kurangnya tingkat kesadaran anggota dalam membayar iuran simpanan wajib dan simpanan wajib pokok yang menjadi modal koperasi dalam mengembangkan usaha yang dijalankan dan operasional koperasi serta modal koperasi yang ada pun tidak mencukupi.

Pembentukan Pelaksanaan Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya koperasi tidak aktif adalah salah satu beban bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina, mengawasi dan mengembangkan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Adapun sebab yang terjadi banyaknya koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe terhambatnya setoran pokok dan setoran wajib anggota kepada koperasi, tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan dan ketiadaan aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi itu sendiri dan kurang partisipasi daripada anggota koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi pada X Pasal 58 Ayat (3) menegaskan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dan kelembagaan usaha koperasi yang wilayah keanggotanya berada dalam 1(satu) Kabupaten/Kota, sedangkan Ayat (4) menyatakan bahwa Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi.

Akan tetapi, yang terjadi dilapangan tidak semua koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe mendapat pembinaan, padahal Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapat pembinaan, padahal Pemerintah Kota Lhokseumawe telah merencanakan berbagai program salah satunya program Peningkatan Kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan meningkatkan kelembagaan dan manajemen koperasi melalui berbagai kegiatan seperti Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pembinaan dan Pembubaran Koperasi, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Pelatihan Akuntansi

akan tetapi yang menjadi penghambatnya ialah keterbatasan anggaran sehingga tidak semua koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe diikutsertakan dalam program tersebut.

Salah satu koperasi yang ada di kota Lhokseumawe yakni koperasi Afdhal yang bergerak pada simpan Pinjam merupakan salah satu koperasi yang masih eksis hingga saat ini, mendapatkan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, tetapi tidak mendapatkan pembinaan dari Perintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe hanya memberikan arahan.

Namun, salah satu Koperasi Wanita Melati Sakti merupakan salah satu koperasi yang masih aktif akan tetapi koperasi tersebut menerapkan sistem bagi hasil dengan anggota yang terdaftar dalam keanggotaan koperasi tersebut merupakan ibu rumah tangga, pedagangang untuk untuk membantu dalam segi permodalan usaha sehingga pengembaliannya dilakukan secara rutin.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe berpendapat bahwa, koperasi merupakan yang berbadan hukum akan tetapi mereka tidak boleh ada pihak luar yang mengintervensi akan koperasi tersebut. Sehingga pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dilakukan apabila koperasi meminta bantuan untuk dibina sesuai dengan kendala yang dihadapinya sehingga dinas tidak hanya membina dalam waktu hari aktif akan tetapi membina saat ada kesempatan seperti adanya Rapat Anggota Tahunan serta mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif lagi sehingga dapat membubarkan koperasi tersebut.

Kemudian ditemukan juga adanya pelimpahan kewenangan Walikota Lhokseumawe kepada Kecamatan salah satu kewenangan yang dilimpahkan yaitu Pengembangan dan Pembinaan Koperasi yang merupakan Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) dari pihak kecamatan itu sendiri. Namun desa memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa yang termaksud dalam Bab IV Pasal 18 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan adat istiadat desa. Namun dalam Bab V Pasal 26 Ayat (2) Huruf (h) menyatakan bahwa Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa serta mengidentrgrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf (m) menegaskan bahwa mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partipatif. Namun, secara khusus gampong juga adanya kewenangan yang diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang termaksud dalam Bab III Tentang Urusan Pemerintah Gampong Pasal 13 Ayat (3) Huruf (e) menjelaskan bahwa, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Namun berdasarkan temuan dilapangan, pihak kecamatan dan pihak desa tidak memiliki data keteragaan koperasi yang ada diwilayahnya sehingga tidak mengetahui bagaimana keadaan koperasi secara nyata dilapangan. Bahkan mereka

tidak juga mengetahui adanya program-program yang telah dicadangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Strategi memiliki determinan umum yang terdiri dari komponen yang salah satunya adalah komunikasi, dimana secara implicit, jika komunikasi baik strategi akan berhasil. Namun dalam hal ini, terjadinya komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dengan masyarakat yang menyebabkan aparatur kecamatan, aparatur desa dan koperasi serta masyarakat belum merespon dengan baik terhadap Program Pembinaan Koperasi, bahkan masyarakat tidak mengetahui akan keberadaan koperasi yang ada didesanya sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan belum tercapai sesuai dengan harapan sehingga startegi pembinaan bagi koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe belum berjalan maksimal.

Kemudian pelaksana Pembinaan koperasi ialah Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi Bab X Pasal 58 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Daerah yang membidangi koperasi.

Namun sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan yang dimiliki mencakup hingga pemerintah tingkat desa sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe yang disebut dengan Pembina Tingkat Kota Lhokseumawe dan kecamatan disebut dengan Pembina Tingkat Kecamatan hingga desa atau gampong

yakni disebut dengan Pembina Tingkat Gampong yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi merupakan salah satu program yang tertuang dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017, untuk mensukseskan Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi dan Pelatihan Akuntansi akan tetapi saat ini belum berjalan dengan maksimal, hal ini masih banyaknya koperasi tidak aktif daripada koperasi aktif yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Lhokseumawe.

Hal ini dapat dilihat Koperasi secara keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 294 unit koperasi dengan kategori aktif sebanyak 119 unit koperasi dan kategori tidak aktif sebanyak 175 unit koperasi. Namun pada tahun 2018 sebanyak 300 unit koperasi dengan rincian kategori aktif sebanyak 127 dan tidak aktif sebanyak 125 unit koperasi dan 48 unit koperasi yang telah dibibarkan dan 6 unit koperasi telah bertambah, hal ini terjadi peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif hingga sebaliknya terjadi penurunan koperasi aktif di Kota Lhokseumawe.

Namun, faktor penghambat lain ialah keterbatasan anggaran, tidak sesuai dalam hal pembagian dana atau modal untuk koperasi, lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Daerah Kota Lhokseumawe, lemahnya koordinasi antara instansi dinas dengan kecamatan dan desa, dan belum adanya petunjuk teknis yang jelas dalam beberapa program, kurangnya pelatihan dan diklat bagi aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam membina koperasi yang ada di seluruh wilayah Kota Lhokseumawe sehingga menjadi

hambatan dalam perkembangan koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe juga kurangnya pengasan yang dilakukan oleh dinas, seharusnya berdasarkan defenisi dari strategi, strategi akan mencapai tujuan yang maksimal jika adanya koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.

Kendala Eksternal

Salah satu penghambat dalam menumbuhkan koperasi aktif ialah lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe, lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan aparatur kecamatan yang ada di dalam Kota Lhokseumawe salah satunya Kecamatan Banda Sakti dan lemahnya koordinasi aparatur kecamatan dengan aparatur desa selama ini sehingga kewenangan yang melekat baik pada camat maupun pada keuchik yang ada dalam Kota Lhokseumawe khususnya Kecamatan Banda Sakti. Namun, tiadanya kantor serta pengelola koperasi ketika ditelusuri sehingga terbatas pula mengidentifikasi koperasi di lapangan dan pembinaa, pelatih serta terbatas pula kapasitas koperasi maupun pihak-pihak lain yang akan diikutsertakan pada saat pembinaan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Faktor penghambat lainnya ialah lemahnya partisipasi aktif anggota dalam membayar iuran pokok dan iuran wajib koperasi, kurangnya sosialisasi terhadap aturan baru kepada kecamatan, desa dan koperasi serta masyarakat. Adapun factor penghambat berdasarkan temuan dan analisa terhadap kondisi dan kelembagaan koperasi yakni ketiadaan Dewan Koperasi Indonesia yang ada di Kota Lhokseumawe sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian masyarakat bahwa, koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk

memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Adapun masalah salah satu kegiatan yang dijalankan oleh Dekopinda yakni melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, koperasi harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi. Namun seperti salah satu koperasi yang tidak aktif yaitu koperasi Syuhada yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa koperasi tersebut tidak pernah ada aktivitas, hanya terlibat papan namanya saja sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui akan aktivitas Koperasi Syuhada tersebut yang terletak di Pasar Impres Kota Lhokseumawe.

Namun, salah satu Koperasi Melati Sakti merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam merupakan salah satu koperasi aktif yang mendapatkan pembinaan berupa arahan dari Dinas Peindustriaian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. Kemudian, koperasi tugu Pahlawan merupakan salah satu Koperasi yang aktif secara kelembagaan akan tetapi dalam keadaan vakum dan tidak ada aktivitas usaha yang dijalankan, hal ini tidak jelasan perguruan sehingga membuat koperasi tersebut koperasi tersebut terabaikan dan tidak ada pembinaan yang didapatkan oleh Koperasi Tugu Pahlawan ini selain hanya arahan yang mereka terima dari Dinas Peindustriaian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

Namun, sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, apabila implementor memiliki sikap dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan yaitu fokus pada kepentingan masyarakat maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Berdasarkan temuan lapangan

menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi telah menurun sebagaimana tidak jujur pengurus atau pengelola koperasi dalam berkoperasi sehingga masyarakat tidak mau berkoperasi. Kemudian partisipasi anggota dalam membayar iuran yakni simpanan pokok dan simpanan wajib masih rendah sehingga permodalan koperasi menipis sehingga banyak koperasi tidak aktif hanya berharap bantuan pemerintah.

Kemudian hambatan lain secara eksternal yakni belum meratanya kualitas sumber daya manusia setiap bidangnya, lemahnya kerja sama dan koordinasi antar institusi, dan keterbatasan anggaran serta lemahnya pemasaran dalam memasarkan produk yang dimiliki oleh koperasi dalam menunjang realisasi program dan kegiatan salah satunya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Kegiatan pendukung lainnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan di bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Pembinaan Koperasi di Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan maksimal hal ini pemerintah memberikan, konsultasi dan kunjungan ke lapangan guna melihat secara langsung akan tetapi tidak dilakukan secara rutin dengan melakukan Penilaian Kebaikan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Koperasi, Pengarahan, Pelatihan Manajemen Koperasi dan Pelatihan Akuntansi.
2. Kendala strategi Pembinaan Koperasi hal ini disebabkan oleh hambatan internal yaitu lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Kecamatan dan Desa, serta terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Sedangkan, hambatan eksternal lemahnya integritas dan kompetensi pengurus, anggota dan badan pengawas dalam mengelola koperasi serta rendahnya kesadaran anggota dalam menyetor simpanan Pokok dan Simpanan wajib dalam melakukan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori (2014). *Strategi Public relations*, Bogor : PT Akasara Pratama
- Barthos, Basir. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara : Jakarta
- Baswir, Revrison. (2010) *koperasi indonesia* , yogjakarta : BPFE-UGM
- Hasan, M. Iqbal, (2002).*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendrojogi. (2004). *Koperasi, Asaz-Asaz, Teori dan Praktik* : PT. Raja Grafindo
- Mathis, dan Jackson, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Nitisusastro (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta : Bnadung.
- Oliver, Sandra. (2006). *Strategi public Relation*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Pawito, (2007) *penelitian komunikasi kualitatif*, PT LkiS Pelangi Aksara, Bandung.
- Perdede, Pontas M. (2011). *Manajemen Strategi dan kebijakan perusahaan*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Purwonto, Iwan, (2004). *Manajemen Strategi, Yrama Widya*: Bandung.
- Rangkuti, Freddy, (2004). *Manajemen Persediaan: Aplikasi di Bidang Bisnis*, GrafindoPersada, Jakarta.
- Robert H. Hayes, Alfonsus Sirait (2006). *Manajemen strategi pembinaan*, PT Gelora Aksara
- Rudianto, (2006). *Akuntansi Manajemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Silallahi, Ulber. (2009). *Metode penelitian sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja pegawai : Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subandi. (2010). *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukamdiyo, Ign. (1996). *Manajemen Koperasi* : Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Sumarsono, Sonny. (2003). *Manajemen Koperasi*. Graha Ilmu Yogyakarta
- Suhartati Joesron, Tati. (2005). *Manajemen Strategi Koperasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tangdilintin, Philips. 2008. *Pembinaan Generasi Muda*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tanzeh, Ahmad (2009). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras.